TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PERUMUSAN STRATEGI PELAYANAN SERTIFIKASI IMPOR
PRODUK HASIL PERIKANAN BERBASIS SISTEM ELEKTRONIK
DI BALAI KIPM JAKARTA II**

UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Manajemen Perikanan**

Disusun Oleh :

YOYOK FIBRIANTO

NIM. 015584501

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN PERIKANAN**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “Perumusan Strategi Pelayanan Sertifikasi Impor Produk Hasil Perikanan Berbasis Sistem Elektronik di Balai KIPM Jakarta II” adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Mei 2018

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'KANTOR KEPALA BALAI KIPM JAKARTA II' and a unique identification number '51AFF19863823'. The signature is written in a cursive style.

**Yoyok Fibrianto
NIM. 015584501**

ABSTRAK

PERUMUSAN STRATEGI PELAYANAN SERTIFIKASI IMPOR PRODUK HASIL PERIKANAN BERBASIS SISTEM ELEKTRONIK DI BALAI KIPM JAKARTA II

Yoyok Fibrianto
Universitas Terbuka
tatapelayanan@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal yang dihadapi oleh Balai KIPM Jakarta II sebagai dasar untuk menentukan alternatif strategis yang sesuai untuk Balai KIPM Jakarta II. Syaratnya termasuk kekuatan dan kelemahan internal Balai KIPM Jakarta II. Sedangkan kondisi eksternal meliputi peluang dan ancaman Balai KIPM Jakarta II. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus deskriptif kualitatif. Data primer dan sekunder diolah untuk mengumpulkan informasi tentang kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman Balai KIPM Jakarta II. Informasi yang diperoleh diproses menggunakan Matriks IFE, Matriks EFE, Matriks IE, dan Matriks SWOT. Dari hasil analisis IFE, EFE dan matriks IE Balai KIPM Jakarta II memiliki skor total 2,65 sedangkan matriks IFE Badan Karantina Ikan dan Lembaga Inspeksi Jakarta II memiliki skor total 3,09. Posisi dalam matriks kuadran IE ditentukan dari skor total matriks IFE sebagai sumbu x dan skor total EFE sebagai matriks sumbu y. Dari hasil analisis ini, posisi Balai KIPM Jakarta II berada di kuadran IV. Posisi ini menunjukkan Balai KIPM Jakarta II dalam posisi untuk tumbuh dan berkembang (tumbuh dan dibangun). Strategi yang dapat diterapkan meliputi strategi intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk) atau integratif (integrasi ke belakang, integrasi ke depan, dan integrasi horizontal). Berdasarkan analisis dari matriks SWOT, Balai KIPM Jakarta II dapat menggunakan strategi penetrasi pasar. Strategi ini dianggap sebagai strategi yang paling tepat untuk dilakukan oleh Balai KIPM Jakarta II dalam menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi.

Keywords: Analisis SWOT, Formulasi Strategi, Implementasi Strategi

ABSTRACT**FORMULATION OF FISHERIES PRODUCT IMPORT CERTIFICATION SERVICES BASED ON ELECTRONIC SYSTEMS IN FQIA JAKARTA II**

Yoyok Fibrianto
Universitas Terbuka
tatapelayanan@gmail.com

This study aims to determine the internal and external conditions faced by Regional Fish Quarantine and Inspection Agency of Jakarta II as the basis for determining the appropriate strategic alternatives for the FQIA of Jakarta II. Conditions include the FQIA of Jakarta II's internal strengths and weaknesses. While external conditions include the FQIA of Jakarta II's opportunities and threats. The method used in this research is descriptive qualitative case study approach. Primary and secondary data is processed to gather information about the strengths and weaknesses and the opportunities and threats of the Regional Fish Quarantine and Inspection Agency of Jakarta II. The information obtained was processed using IFE Matrix, EFE Matrix, IE Matrix, and SWOT Matrix.

From the analysis of IFE, EFE and IE matrix Regional Fish Quarantine and Inspection Agency of Jakarta II has a total score of 2.65 while IFE matrix Regional Fish Quarantine and Inspection Agency of Jakarta II has a total score of 3.09. Position in IE quadrant matrix determined from the total score of IFE matrix as the x-axis and the EFE total score as the y-axis matrix. From the results of this analysis, the position of Regional Fish Quarantine and Inspection Agency of Jakarta II is in quadrant IV. This position indicates Regional Fish Quarantine and Inspection Agency of Jakarta II in a position to grow and develop (grow and built).

The strategy could be applied include intensive strategy (market penetration, market development, and product development) or integrative (backward integration, forward integration, and horizontal integration). Based on the analysis of the matrix SWOT, Regional Fish Quarantine and Inspection Agency of Jakarta II can use market penetration strategy. This strategy is considered the most appropriate strategy to be made by Regional Fish Quarantine and Inspection Agency of Jakarta II in the face of environmental changes that occurred.

Keywords: SWOT analysis, strategy formulation, strategy implementation

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Perumusan Strategi Pelayanan Sertifikasi Impor Produk Hasil Perikanan Berbasis Sistem Elektronik Di Balai KIPM Jakarta II

Penyusun TAPM : Yoyok Fibrianto

NIM : 015584501

Program Studi : Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan

Hari/Tanggal : Jum'at, 11 Mei 2018

Menyetujui:

Pembimbing II,

Dr. Sri Listyarini, M.Ed.
NIP. 19610407 198602 2 001

Pembimbing I,

Prof. Dr. Joko Santoso, M.Si.
NIP. 19670922 199203 1 003

Penguji Ahli

Dr. Budhi Hascaryo Iskandar, M.Si.
NIP. 19670215 199103 1 004

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Sains, Teknologi,
Enjineriing dan Matematika

Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si.
NIP. 19631111 198803 2 002

Dekan FMIPA

Dekan FMIPA
NIP. 19640217 199303 1 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN PERIKANAN

PENGESAHAN

NAMA : Yoyok Fibrianto
NIM : 015584501
PROGRAM STUDI : Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan
JUDUL TAPM : Perumusan Strategi Pelayanan Sertifikasi Impor Produk Hasil Perikanan Berbasis Sistem Elektronik Di Balai KIPM Jakarta II

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 11 Mei 2018
Waktu : 09.00 – 15.00 WIB

Dan telah dinyatakan Lulus

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji : Dr. Sri Listyarini, M.Ed :

Penguji Ahli : Dr. Budhi Hascaryo Iskandar, M.Si :

Pembimbing I : Prof. Dr. Joko Santoso, M.Si :

Pembimbing II : Dr. Sri Listyarini, M.Ed :

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains, Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
2. Kepala UPBJJ-UT, sebagai penyelenggara Program Pascasarjana;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Joko Santoso, M.Sc dan Dr. Sri Listyarini, M.Ed selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
4. Ketua Bidang Ilmu/Program Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Ilmu Kelautan bersama Jajarannya;
5. Sahabat maupun semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini;

Mengingat keterbatasan yang ada, maka penulis mengharapkan berbagai saran dan kritik guna perbaikan lebih lanjut.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi yang membutuhkannya.

Jakarta, Mei 2018

Yoyok Fibrianto

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Visi dan Misi Balai KIPM Jakarta II.....	7
2.2 Gambaran Umum Pelayanan Sertifikasi Impor.....	9
2.3 Kerangka Pemikiran.....	23
2.4 Alat Analisis Lingkungan Balai KIPM Jakarta II.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian (Metode Penelitian).....	35
3.2 Sumber Informasi (Metode Pengumpulan Data).....	36
3.3 Prosedur Pengumpulan Data.....	36
3.4 Pengumpulan Data.....	38
3.5 Metode Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Analisis IFE Pelayanan Sertifikasi Impor Produk Hasil Perikanan.....	41
4.2 Analisis EFE Pelayanan Sertifikasi Impor Produk Hasil Perikanan.....	43
4.3 Analisis IE Pelayanan Sertifikasi Impor Produk Hasil Perikanan.....	46
4.4 Matriks SWOT Pelayanan Sertifikasi Impor Produk Hasil Perikanan.....	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
5.1 Kesimpulan dan Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Prosedur dan Janji Layanan Tindakan Karantina Terhadap Media Pembawa Risiko Tinggi yang Dimasukkan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	21
Tabel 2.	Prosedur dan Janji Layanan Tindakan Karantina Terhadap Media Pembawa Risiko Rendah yang Dimasukkan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	23
Tabel 3.	Matriks IFE Balai KIPM Jakarta II	40
Tabel 4.	Matriks EFE Balai KIPM Jakarta II	44
Tabel 5.	Matriks SWOT Balai KIPM Jakarta II	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Alur layanan sertifikasi impor hasil perikanan	10
Gambar 2	Aplikasi Permohonan Pemeriksaan Karantina Secara Online	26
Gambar 3.	Alur pikir Perumusan Strategi Pelayanan Sertifikasi Impor Produk Hasil Perikanan Berbasis Sistem Elektronik Di Balai KIPM Jakarta II	30
Gambar 4.	Alur Matrix Analisis	36
Gambar 5.	Kerangka Formulasi Strategis	37
Gambar 6.	Matrik IE Balai KIPM Jakarta II	47
Gambar 7.	Diagram Analisis SWOT	49
Gambar 8.	Prosedur Pengajuan Impor Antar K/L Pada Saat Ini	51
Gambar 9.	Konsep <i>Single Submission</i> BKIPM Dengan K/L	52

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Komitmen negara Republik Indonesia yang sangat tinggi dalam mendukung pelaksanaan perdagangan global ditunjukkan dengan penyusunan dan pemberlakuan sistem penanganan lalu lintas barang impor yang cepat, tepat, dan akurat. Pemberlakuan sistem tersebut diharapkan dapat mengatasi kondisi pelayanan yang ada saat ini yang masih banyak terjadi kekurangan seperti masalah waktu, birokrasi yang terlalu berbelit-belit, tingginya pembiayaan yang harus dikeluarkan dalam pengurusan dokumen, serta tidak akuratnya data yang berikan oleh petugas.

Melalui sistem penanganan lalu lintas barang impor yang cepat, tepat, dan akurat diharapkan masalah-masalah yang terkait dengan kepentingan nasional dapat terselesaikan, khususnya yang terkait dengan berbagai jenis kejahatan seperti kejahatan transnasional, penyelundupan obat-obatan, *illegal fishing*, dan juga peredaran ikan secara melawan hukum. Pembangunan sistem tersebut diselenggarakan dengan melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* melalui pembangunan otomasi sistem pelayanan yang terintegrasi antar pemerintah dengan tujuan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan keseluruhan proses impor.

Salah satu bentuk komitmen Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) dalam mendukung sistem percepatan pengeluaran arus barang adalah melakukan percepatan waktu pelayanan karantina ikan tanpa mengurangi ketepatan serta akurasi tindakan karantina ikan. Terkait dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk merevisi Keputusan Kepala Badan

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 251/KEP-BKIPM/2013 tentang Prosedur Operasional Standar dan *Service Level Arrangement* untuk Impor Komoditas Ikan dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* di Lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Hal tersebut mengingat waktu layanan yang ditetapkan masih terlalu lama, serta adanya penerapan sistem penjaluran yang pada dasarnya merupakan sistem yang berlaku di instansi Bea dan Cukai. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan proses pelayanan berdasarkan Kategori Tingkat Risiko yang berlaku di lingkup BKIPM.

Dalam menghadapi tantangan era globalisasi maka Balai KIPM Jakarta II dituntut untuk mampu bersaing secara global, mampu berpikiran secara strategis serta dapat menyusun strategi yang tepat dalam menghadapi persaingan. Hal ini dikarenakan pemikiran yang strategis hanya mampu bertahan dalam jangka pendek bukan kapasitas jangka panjang sementara perencanaan yang strategis dapat menjadi jawaban bagi Balai KIPM Jakarta II yang ingin mengembangkan usahanya (Umar, 1999:xii).

Strategi sendiri didefinisikan sebagai sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai (David, 2009:18). Dalam proses perumusan strategi, diperlukan suatu analisis mendalam serta menyeluruh mengenai lingkungan internal dan eksternal Balai KIPM Jakarta II (Nugroho, 1999).

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Balai KIPM Jakarta II dalam menentukan strategi yang sesuai adalah dengan menggunakan analisis lingkungan. Analisis lingkungan adalah suatu proses sistematis yang digunakan oleh perencana strategi untuk memantau kondisi lingkungan yang berpengaruh bagi Balai KIPM

Jakarta II (Kusuma, 2011). Analisis lingkungan tersebut terdiri dari analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal Balai KIPM Jakarta II. Analisis lingkungan internal Balai KIPM Jakarta II membantu untuk melihat kekuatan dan kelemahan Balai KIPM Jakarta II. Sedangkan analisis lingkungan eksternal Balai KIPM Jakarta II membantu untuk melihat peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh Balai KIPM Jakarta II.

Untuk dapat memahami kondisi internal maupun eksternal, Balai KIPM Jakarta II dapat menggunakan alat analisis SWOT. Menurut Paramarta (2009), analisis SWOT adalah analisis identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi Balai KIPM Jakarta II. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strenghts*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*) Dengan analisis ini Balai KIPM Jakarta II dapat mengenali (mengidentifikasi) faktor-faktor strategik Balai KIPM Jakarta II, yaitu berbagai kondisi pada lingkungan eksternal dan internal Balai KIPM Jakarta II, yang secara strategik berpengaruh besar terhadap keberhasilan Balai KIPM Jakarta II dan posisi Balai KIPM Jakarta II dalam persaingan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2011), menunjukkan fakta bahwa dengan melihat kinerja Balai KIPM Jakarta II terhadap faktor-faktor strategiknya, Balai KIPM Jakarta II dapat mengetahui posisi eksternal dan internalnya. Atas dasar posisi internal dan eksternal tersebut, serta memperhatikan konsep-konsep strategik, maka dengan teknik dan analisis tertentu, Balai KIPM Jakarta II dapat merumuskan strategi- strategi yang diperlukan dalam menghadapi berbagai macam permasalahan dalam kegiatan bisnisnya.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan sertifikasi yang cepat dan transparan, maka BKIPM Jakarta II harus segera menetapkan strategi yang tepat agar tujuan peningkatan pelayanan sertifikasi impor dapat tercapai dengan baik serta dapat memberikan dampak yang positif bagi negara.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alat rekomendasi dalam rangka menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan Pelayanan Sertifikasi Impor Produk Hasil Perikanan di Balai KIPM Jakarta II.

Adapun permasalahan yang terjadi pada pelayanan sertifikasi impor produk hasil perikanan adalah proses perizinan antar Kementerian dan Lembaga terlalu panjang, sehingga berdampak pada lamanya proses sertifikasi impor karena terkendala masalah perizinan di Kementerian dan Lembaga terkait. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah perumusan strategi pelayanan Sertifikasi impor produk hasil perikanan Berbasis sistem elektronik di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II, BKIPM, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi pelayanan Sertifikasi Impor Produk Hasil Perikanan Balai KIPM Jakarta II, khususnya untuk produk Hasil Perikanan ?
2. Apakah faktor, aktor, dan indikator yang berpengaruh secara dominan dalam angka peningkatan kualitas pelayanan yang diterapkan Balai KIPM Jakarta II ?

3. Strategi peningkatan mutu pelayanan seperti apa yang dapat diterapkan pada Balai KIPM Jakarta II ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi kondisi Pelayanan Sertifikasi Impor Produk Hasil Perikanan di Balai KIPM Jakarta II.
2. Menganalisis faktor, aktor, indikator yang berpengaruh secara dominan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan yang diterapkan Balai KIPM Jakarta II.
3. Merumuskan strategi peningkatan mutu Pelayanan Sertifikasi Impor Produk Hasil Perikanan terbaik yang dapat diterapkan oleh Balai KIPM Jakarta II.

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat:

1. Bermanfaat bagi pelaku usaha/Sertifikasi Importer Hasil Perikanan sehingga mendapatkan manfaat maksimal dari pelayanan dengan sistem SISKARIN sehingga bisa mempercepat proses pemberian ijin.
2. Memberikan informasi bagi pemangku kebijakan di Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam merumuskan strategi peningkatan pelayanan berbasis IT.

3. Menjadi referensi awal bagi peneliti lain yang membahas topik yang terkait.

1.5. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian dibatasi pada kajian Pengembangan Strategi Pelayananan Sertifikasi Impor Produk Hasil Perikanan Berbasis Sistik Karantina Ikan Online (SISKARIN) di Balai KIPM Jakarta II.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Visi dan Misi Balai KIPM Jakarta II

Balai KIPM Jakarta II mempunyai **Visi** yaitu : **“Hasil Perikanan Yang Sehat, Bermutu, Aman Konsumsi Dan Terpercaya”**

VISI sebagaimana tersebut diatas **bermakna**: Hasil perikanan mengandung arti semua barang yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi mengandung arti hasil perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (Sehat), memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (Bermutu) dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (Aman Konsumsi). Terpercaya mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan (HC dan HACCP) merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan internasional.

Balai KIPM merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang sangat potensial, sehingga dituntut bekerja secara cepat, tepat dan efisien dalam memberikan jaminan pelayanan sesuai kebutuhan atau permintaan pengguna jasa. Pencapaian Visi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Jakarta II dapat terwujud apabila ada dukungan sumber daya manusia, sarana dan fasilitas yang memadai serta selalu mengikuti perkembangan teknologi/informasi untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan **Misi** sebagai berikut :

1. Melindungi dan menyelamatkan kelestarian sumber daya ikan dan usaha perikanan dari serangan HPI/HPIK;
2. Mengembangkan dan meningkatkan teknik dan metode karantina ikan yang efektif;
3. Menegakkan peraturan perundangan karantina ikan terhadap masyarakat pengguna jasa karantina ikan masyarakat non perikanan;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan sistem informasi karantina ikan;
5. Mengembangkan sistem pengelolaan administrasi perkantoran.

Sebagai Janji Layanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Jakarta II adalah: ” **Kepuasan Anda Target Pelayanan Kami**”

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Balai KIPM Jakarta II, serta berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: Per.25/MEN/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Tata Pelayanan mempunyai Tugas: Melaksanakan pencegahan masuk, tersebaranya HPIK, dan keluarnya HPI yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pencegahan masuk, tersebarnya HPIK, dan keluarnya HPI yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina;
- b. pelayanan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- c. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- d. pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi; dan penyiapan pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK.

2.2. PENGANGGAR GAMBARAN UMUM PELAYANAN SERTIFIKASI IMPOR PRODUK PERIKANAN BALAI KIPM JAKARTA II DI ZONA KARANTINA IKAN PELABUHAN TANJUNG PRIOK.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor. 29/KEP-BKIPM/2015 tentang Prosedur dan Janji Layanan Tindakan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan di Zona Karantina Pelabuhan Laut. Pelayanan Sertifikasi Impor Produk Perikanan Balai KIPM Jakarta II di Zona Karantina Ikan Pelabuhan Tanjung Priok mengalami penyederhanaan kategori risiko dari 4 (empat) kategori risiko (Tinggi, Medium, Rendah, *Negligible*) disederhanakan menjadi 2 (dua) kategorisasi yaitu (Kategorisasi Media Pembawa Risiko Tinggi dan Rendah). Hal tersebut dilakukan dalam rangka memberikan kepastian, penerapan tindakan Karantina dalam mendukung system percepatan pengeluaran arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Selain perihal tersebut diatas awalnya proses tindakan karantina terhadap pemeriksaan Media Pembawa berada di belakang Bea dan Cukai, setelah terbitnya Per Kaban Nomor. 29/KEP-BKIPM/2015 posisi pemeriksaan karantina dilaksanakan di depan Bea dan Cukai, sehingga pemeriksaan bisa dilakukan diatas alat angkut sebelum kapal sandar. Dengan adanya perubahan skema tersebut, proses pencegahan masuknya dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina dan mutu hasil perikanan dari negara wabah dapat dilakukan

lebih awal. Penolakan dapat dilakukan sebelum Media Pembawa tersebut diturunkan dari alat angkut (Kapal).

Alur proses importasi produk hasil perikanan dapat dilihat sesuai gambar 1 berikut:

Gambar 1. Alur layanan sertifikasi impor hasil perikanan

2.2.3. Persyaratan, Tindakan dan Prosedur Pemasukan (Impor) Produk Hasil Perikanan

A. Persyaratan Pemasukan

1. Setiap media pembawa yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilengkapi dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengajuan/permohonan pemasukan impor oleh importir atau kuasanya dilakukan melalui PPK *on line* karantina ikan.

b. Persyaratan Karantina

- 1) Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) dari negara asal dan negara transit;
- 2) Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- 3) Dilaporkan ke petugas karantina ikan untuk keperluan tindakan karantina.

2. Pengajuan/permohonan untuk pemasukan impor melalui PPK *on line* karantina ikan wajib dilengkapi dokumen perizinan:

a. Ikan Hidup

Surat Izin Pemasukan Ikan Hidup yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB);

b. Hasil Perikanan

- 1) Surat Izin Pemasukan Hasil Perikanan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (DJP2HP);
- 2) Surat Keterangan Asal/*Certificate of Origin* (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal;
- 3) Hasil uji laboratorium yang terakreditasi dari negara asal yang menyatakan bahwa hasil perikanan bebas dari cemaran mikrobiologi, residu, kontaminan, dan bahan kimia berbahaya lainnya, serta memiliki bobot tuntas paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) untuk produk beku, sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Keterangan label dan iklan pangan; dan
- 5) Sertifikat GAP untuk hasil perikanan budidaya.

c. Benda Lain

- 1) Surat Keterangan Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan

Budidaya untuk benda lain berupa pakan dan bahan baku pakan ikan;

- 2) Surat Keterangan Pemasukan Sampel Obat Ikan untuk sampel obat ikan, Surat Keterangan Pemasukan Obat Ikan untuk obat ikan dan Surat Keterangan Pemasukan Bahan Baku Obat Ikan untuk bahan baku obat ikan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Sertifikat Analisa atau *Certificate of Analysis* (CoA) dan Surat Keterangan Asal atau *Certificate of Origin* (CoO) dari negara asal;

d. Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Media Pembawa ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia di Zona Karantina Pelabuhan Laut

1. Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen dilakukan terhadap PPK yang sudah dilengkapi dengan dokumen karantina dan dokumen persyaratan lainnya.

2. Analisis Media Pembawa

Kegiatan analisa dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko terhadap pemasukan media pembawa yang akan dimasukkan ke dalam wilayah RI, dengan hasil berupa:

- a. media pembawa dengan tingkat risiko rendah;
- b. media pembawa dengan tingkat risiko tinggi; atau

c. *media pembawa yang dilarang pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.*

3. Pemeriksaan Kebenaran Isi Dokumen

Pemeriksaan kebenaran isi dokumen dilakukan untuk mengetahui kesesuaian isi (jenis, jumlah dan / atau ukuran) media pembawa dengan dokumen yang menyertainya. Media pembawa yang akan dilakukan pemeriksaan harus dalam kondisi siap periksa, dengan ketentuan:

a. Media pembawa risiko tinggi

Pemeriksaan jenis, jumlah dan/atau ukuran media pembawa dilakukan di instalasi karantina ikan di luar kawasan pabean.

b. Media pembawa risiko rendah

Pemeriksaan jenis, jumlah dan/atau ukuran media pembawa dilakukan di zona karantina di dalam kawasan pabean

4. Pemeriksaan Klinis/Organoleptik

Pemeriksaan klinis / organoleptik dilakukan untuk mengetahui ada/tidaknya HPIK maupun mutu media pembawa yang didasarkan pada pengamatan gejala/perubahan abnormalitas secara visual maupun karakteristik fisik (warna dan tekstur), serta bio-kimia (bau, kontaminan/tercemar dan rasa) melalui alat penginderaan manusia, dengan ketentuan:

- a. Media pembawa dengan risiko tinggi, dilakukan pemeriksaan klinis/organoleptik di instalasi karantina ikan di luar kawasan pabean.
- b. Media pembawa dengan risiko rendah, pemeriksaan klinis/organoleptik dilakukan di zona karantina pelabuhan laut.

5. Penahanan Media Pembawa

Tindakan penahanan untuk menahan media pembawa yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dilakukan apabila media pembawa tidak memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen karantina. Terhadap media pembawa yang ditahan, pemilik/kuasa pemilik media pembawa diberikan waktu untuk melengkapi persyaratan. Tindakan karantina penahanan terhadap media pembawa dilakukan di zona karantina pelabuhan laut.

6. Penolakan Media Pembawa

Tindakan penolakan dikenakan terhadap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, apabila:

- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara isi dokumen dengan fisik.
- b. Media pembawa berasal dari negara, daerah, atau tempat yang pemasukannya dilarang; berasal dari atau transit di

negara, daerah, atau tempat sedang berjangkit HPIK yang dapat ditularkan melalui media pembawa tersebut atau termasuk yang pemasukannya dilarang.

c. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorium ternyata ditemukan agen penyakit ikan karantina atau terkontaminasi bahan berbahaya yang melebihi batas maksimum.

d. Agen penyakit yang ditemukan pada media pembawa tidak memungkinkan diberikan perlakuan untuk meng-hilangkan bahaya yang dapat ditimbulkan.

e. Pemilik media pembawa tidak dapat melengkapi dokumen yang dipersyaratkan sesuai batas waktu yang ditentukan.

7. Pemusnahan Media Pembawa Tindakan pemusnahan dilakukan untuk memusnahkan media pembawa sebagai tindak lanjut dari tindakan karantina sebelumnya, apabila:

a. Media pembawa tidak segera dibawa keluar dari wilayah tempat pemasukan dalam batas waktu yang ditentukan.

b. Pemilik/kuasa pemilik media pembawa tidak bersedia/sanggup untuk melakukan pengeluaran dari wilayah tempat pemasukan.

c. Ditemukan agen penyakit ikan atau bahan berbahaya yang melebihi batas maksimum yang ditetapkan.

8. Pembebasan Media Pembawa

Tindakan pembebasan dilakukan terhadap media pembawa setelah dikenakan tindakan karantina sebelumnya dengan mengizinkan media pembawa untuk dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan, apabila:

- a. Pemilik/kuasa pemilik telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan;
- b. Hasil pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan adanya HPIK atau bahan berbahaya yang melebihi batas maksimum yang ditetapkan.
- c. Pemilik/kuasa pemilik telah menyelesaikan pembayaran jasa karantina.

E. Prosedur Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa yang Dimasukkan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia di Zona Karantina Pelabuhan Laut.

Berdasarkan permohonan pemeriksaan karantina yang diajukan pemilik/kuasa pemilik media pembawa, petugas karantina UPT KIPM dalam memberikan pelayanan tindakan karantina di tempat-tempat pemasukan mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Pemohon yang teregistrasi mengajukan PPK kepada UPT KIPM setempat secara *on line*. Apabila pemohon belum

memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan/atau sistem elektronik tidak berfungsi, maka PPK dapat dilakukan secara manual dengan ketentuan:

- a. PPK sudah diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kedatangan untuk barang muatan dalam bentuk mati, beku, olahan dan benda lain; atau 2 (dua) hari sebelum kedatangan untuk barang muatan dalam bentuk ikan hidup dan menyerahkan media pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina pada saat tiba di tempat pemasukan;
 - b. Media pembawa yang akan diperiksa tidak lebih dari 3 (tiga) macam dan 3 (tiga) bentuk, dalam kemasan standar 20 (dua puluh) inci di dalam 1 (satu) peti kemas.
2. PPK *on line* diverifikasi secara elektronik oleh Petugas Penerima Dokumen/Operator.
 3. Dokumen fisik (*hard copy*) diterima oleh Petugas Penerima Dokumen/Operator.
 4. Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen oleh Kepala UPT atau Pejabat yang ditunjuk.
 5. PHPI melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen.
 6. Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk menerima, memverifikasi

dan mendisposisi hasil pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen.

- a. Melakukan tindakan penahanan atau penolakan terhadap pemasukan media pembawa, apabila hasil pemeriksaan dianggap tidak lengkap dan tidak sah;
- b. Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Analisis Media Pembawa, apabila hasil pemeriksaan dianggap lengkap dan sah.

7. PHPI melakukan analisis untuk menentukan tingkat risiko terhadap pemasukan media pembawa.

8. Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk menerima, memverifikasi dan mendisposisi hasil analisis media pembawa.

- a. Menerbitkan Surat Penolakan (KI-D11), apabila didapatkan media pembawa termasuk yang dilarang pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

- b. Menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D7) dan Surat Keterangan Masuk IKI (KI-D8), dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina lebih lanjut di instalasi karantina, apabila didapatkan media pembawa dengan tingkat risiko tinggi;

- c. Menerbitkan Surat Pemindahan Media Pembawa ke Zona Karantina (SPMP) atau KI-01 dan Surat Perintah Pemeriksaan Kebenaran Isi Dokumen, apabila didapatkan media pembawa

- dengan tingkat risiko rendah;
9. PHPI menempelkan segel karantina pada kontainer dan melaksanakan pengawalan terhadap media pembawa tingkat risiko tinggi ke instalasi karantina.
 10. PHPI melaksanakan pemeriksaan kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran media pembawa di zona karantina untuk media pembawa dengan tingkat risiko rendah.
 11. Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk menerima, memverifikasi dan mendisposisi hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen.
 - a. Menerbitkan Surat Penolakan (KI-D11), apabila ditemukan ketidaksesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran media pembawa dengan dokumen yang menyertainya;
 - b. Menerbitkan Surat Pemusnahan (KI-D13), apabila ditemukan media pembawa busuk/rusak;
 - c. Menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D7) untuk dilalulintasbebas, apabila didapatkan kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran terhadap pemasukan bahan baku obat, sampel obat dan obat ikan; dan
 - d. Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Klinis/organoleptik terhadap media pembawa, apabila didapatkan kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran media pembawa dengan dokumen yang menyertainya.
 12. PHPI melaksanakan pemeriksaan klinis / organoleptik terhadap

media pembawa yang didapati kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran media pembawa di zona karantina.

13. Kepala UPT/ Pejabat yang ditunjuk menerima, memverifikasi dan mendisposisi hasil pemeriksaan klinis/organoleptik media pembawa.

a. Menerbitkan Surat Pelepasan (KI-D12), apabila media pembawa dinyatakan sehat/tidak tertular HPIK dan memenuhi standar mutu; atau

b. Menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D7) dan Surat Keterangan Masuk IKI (KI-D8) dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina lebih lanjut di instalasi karantina, apabila media pembawa diduga tertular HPIK.

14. PHPI menempelkan segel karantina pada kontainer dan melaksanakan pengawalan terhadap media pembawa tingkat risiko rendah yang diduga tertular HPIK ke instalasi karantina ikan.

F. Janji Layanan Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa yang Dimasukkan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia di Zona Karantina Pelabuhan Laut

1. Media Pembawa Berisiko Tinggi

Petugas Karantina dalam memberikan pelayanan tindakan karantina

terhadap media pembawa risiko tinggi yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia menggunakan standar waktu sesuai Tabel 1. berikut:

1	Penerimaan Dokumen PPK dan Registrasi (P1)	5 menit
2	Dokumen PPK diterima dan Disposisi (P2)	5 menit
3	Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen (P3.a) dan Penyampaian ke PHPI (P3.b)	10 menit
4	Pelaksanaan Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Keabsahan dan Kelengkapan Dokumen (P4)	15 menit
5	LHP Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen diterima, diverifikasi dan disposisi (P5)	10 menit
6	Penerbitan Surat Perintah Analisis Media Pembawa (P6.a) dan Penyampaian ke PHPI (P6.b)	10 menit
7	Pelaksanaan Analisis Media Pembawa HPIK dan Penerbitan Rekomendasi (P7)	15 menit
8	Rekomendasi Analisa Media Pembawa diterima, diverifikasi dan disposisi (P8)	10 menit
9	Penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (P9) dan Surat Keterangan Masuk Instalasi (P10) untuk dilakukan tindakan karantina lanjutan	10 menit
TOTAL WAKTU		90 menit

Tabel 1. Prosedur dan Janji Layanan Tindakan Karantina Terhadap Media Pembawa Risiko Tinggi yang Dimasukkan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

2. Media Pembawa Berisiko Rendah

Petugas karantina dalam memberikan pelayanan tindakan karantina terhadap media pembawa risiko rendah yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia menggunakan standar waktu sesuai Tabel 2 berikut:

1	Penerimaan Dokumen PPK dan Registrasi (P1)	5 menit
2	Dokumen PPK diterima dan Disposisi (P2)	5 menit
3	Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Dokumen (P3.a) dan Penyampaian ke PHPI (P3.b)	10 menit
4	Pelaksanaan Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen (Perizinan dan Persyaratan Karantina) dan Penerbitan Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP) Dokumen (P4)	15 menit
5	LHP Dokumen diterima, diverifikasi dan disposisi (P5)	10 menit
6	Penerbitan Surat Perintah Analisis Media Pembawa (P6.a) dan Penyampaian ke PHPI (P6.b)	10 menit
7	Pelaksanaan Analisis Media Pembawa HPIK dan Penerbitan Rekomendasi (P7)	15 menit
8	Rekomendasi Analisa Media Pembawa diterima, diverifikasi dan disposisi (P8)	10 menit
9	Penerbitan Surat Perintah Pemindahan Peti Kemas ke Zona Karantina dan Penyampaian ke Operator Terminal (<i>by system</i>) (P11)	10 menit
10	Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Kebenaran Isi Dokumen (P12.a) dan Penyampaian ke PHPI (P12.b)	10 menit
11	Pelaksanaan Pemeriksaan Kebenaran Isi Dokumen (jenis, jumlah dan/atau ukuran) serta Penerbitan LHP (P13)	120 menit
12	LHP Kebenaran Isi Dokumen diterima, diverifikasi dan disposisi (P14)	
13	Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Klinis/Visual/Organoleptik (P16.a) dan Penyampaian ke PHPI (P16.b)	
14	Pelaksanaan Pemeriksaan Klinis/ Visual/ organoleptik serta Penerbitan LHP (P17)	

15	LHP Klinis/Visual diterima, diverifikasi dan disposisi (P18)	10 menit
16	Penerbitan Sertifikat Pelepasan (P19)	10 menit
17	Penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran MP dari Tempat Pemasukan (P20) dan Surat Keterangan Masuk IKI (P21)	10 menit
TOTAL WAKTU MAKSIMUM		250 menit (4 jam, 10 menit)

Tabel 2. Prosedur dan Janji Layanan Tindakan Karantina Terhadap Media Pembawa Risiko Rendah yang Dimasukkan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

G. Kondisi Khusus

1. Persyaratan terhadap pemasukan kembali media pembawa yang ditolak oleh negara tujuan wajib dilengkapi HC asli yang menyertai pada saat ekspor dengan disertai alasan penolakan dari pihak yang berwenang di negara tujuan awal.
2. Untuk impor transit melalui darat, komoditas ikan dikawal oleh petugas dari tempat pemasukan sampai di IKI dan diserahkan terimakan kepada PHPI UPT-KIPM tujuan akhir dengan diterbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Media Pembawa.

2.3. Gambaran Umum Pelayanan Sertifikasi Impor Berbasis Elektronik

2.3.1. Pelayanan Pengajuan Pemeriksaan Karantina (PPK) Online

Aplikasi Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK) online merupakan suatu aplikasi berbasis web yang dibangun oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam menjalankan kegiatan operasional perkarantinaan. Bagian berikut memberikan penjelasan mengenai fungsi utama dan keuntungan aplikasi PPK Online versi web, serta perangkat yang diperlukan sesuai dengan penjelasan dibawah ini:

Fungsi dan Keuntungan Aplikasi

Fungsi utama aplikasi PPK Online versi web di antaranya dapat dipergunakan oleh Pengguna Jasa Karantina untuk mengajukan permohonan pemeriksaan karantinannya secara online tanpa harus datang ke counter pelayanan di UPT. Pengguna Jasa cukup terhubung ke internet melalui berbagai macam perangkat seperti laptop, computer tablet, smartphone dll melalui laman berikut <http://ppk.bkipm.kkp.go.id/> Dengan penggunaan aplikasi PPK Online tersebut dapat UPT lebih siap untuk menjalankan prosedur baku pemeriksaan karantina untuk mengantisipasi kedatangan atau pengiriman suatu komoditi di daerahnya.

Manual Penggunaan Aplikasi PPK Online

Untuk menggunakan aplikasi ppk online versi web, terlebih dahulu pengguna jasa melakukan registrasi ke UPT Karantina terdekat. Setelah

dilakukan verifikasi, UPT Karantina akan memberikan username dan pin kepada perusahaan untuk dapat login menggunakan PPK online versi web. Bagi pengguna jasa yang telah terdaftar sebelumnya (pengguna ppk online versi desktop) tidak perlu melakukan registrasi ulang, cukup menggunakan username dan pin yang sudah dimiliki.

Persyaratan Pengguna Jasa Dalam Pengajuan Pendaftaran PPK Online

1. Membuat surat permohonan untuk mengikuti PPK Online ditujukan kepada UPT Karantina setempat
2. Mengisi Form Pendaftaran PPK Online
3. Melampirkan Copy Akta Pendirian Perusahaan
4. Copy Surat Keterangan Domisi dari Pejabat Setempat
5. Copy NPWP
6. Copy SIUP/SIUJPT
7. Copy SKEP PPJK (bagi perusahaan PPJK)

Menggunakan PPK Online Versi Web

Untuk mengakses PPK online versi web pengguna jasa dapat masuk pada website BKIPM dengan laman sebagai berikut *www.ppk.bkipm.kkp.go.id*
Aplikasi PPK Online ada pada menu interaktif disaksikan pada Gambar 2 berikut ini:

Gambar 2. Aplikasi Permohonan Pemeriksaan Karantina Secara Online

2.3.2. Pelayanan Sertifikasi Impor berbasis Aplikasi SISKARIN

Pembuatan aplikasi SISKARIN (*Sistem Terpadu Komputerisasi Karantina Ikan Online*) dimaksudkan untuk melayani proses operasional UPT. Mulai dari proses pelaporan (PPK), Cetak Surat Tugas, Hasil Tugas, Sertifikat/Pelepasan, Masuk Instalasi, Penolakan, Penahan, Pemusnahan, Cetak Kwitansi. Sistem aplikasi yang dibangun memanfaatkan teknologi pengolahan informasi yang sesuai dengan perkembangan terakhir. Sistem juga dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan user dalam mengoperasikannya dan menampilkan hasil pengolahan data yang *up-to-date*.

Aplikasi SISKARIN ini dibagi menjadi 8 Modul, yang terdiri dari :

a. **MODUL ADMINISTRATOR**

Modul ADMINISTRATOR adalah Modul untuk mengisi semua data referensi yang diperlukan oleh SISKARIN.

Modul Administrator terdiri dari 6 menu sebagai berikut:

1. Menu Data Master
2. Menu Data Penunjang
3. Menu Data dan Referensi
4. Menu Data Jadwal Fungsional
5. Menu Hapus Data Transaksi
6. Menu Tools

b. **MODUL OPERASIONAL**

Modul OPERASIONAL adalah Modul Utama dalam **SISKARIN** yang digunakan untuk mencatat setiap Pelaporan Media Pembawa.

Modul OPERASIONAL dibagi menjadi 8 bagian sbb:

1. Pelaporan
2. Cetak Surat Tugas
3. Hasil Tugas
4. Masuk Instalasi
5. Penolakan
6. Penahanan
7. Pemusnahan
8. Sertifikat.

c. **MODUL PNBP**

Modul **PNBP** adalah Modul dalam **SISKARIN** yang digunakan untuk memasukkan data-data PNBP (Kwitansi) dan SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak).

Modul **NON OPERASIONAL** dibagi menjadi 4 bagian sbb:

1. Bagian Entry Penerimaan / Kwitansi
2. Bagian Cetak Penerimaan / Kwitansi
3. Bagian Entry Penyetoran SSBP
4. Bagian Cetak Penyetoran SSBP

d. **MODUL NON OPERASIONAL**

Modul **NON OPERASIONAL** adalah Modul dalam **SISKARIN** yang digunakan untuk memasukkan data-data Non Operasional, seperti data Dokumen, Kasus, Pelanggaran, Rapat dan Intersepsi.

Modul **NON OPERASIONAL** dibagi menjadi 4 bagian sbb:

1. Bagian Dokumen
2. Bagian Kasus Pelanggaran
3. Bagian Rapat
4. Bagian Intersepsi

e. **MODUL FUNGSIONAL**

Modul FUNGSIONAL merupakan Sistem Pengumpulan Data dan Pelaporan Kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) dalam pelaksanaan Butir-butir Kegiatan dan perolehan Angka Kreditnya.

f. **MODUL ADMINISTRATOR**

Modul Administrator merupakan modul yang digunakan oleh Pengelola Aplikasi yang diberikan Hak Akses sebagai Administrator untuk mengelola aplikasi SISKARIN secara keseluruhan seperti memberikan login dan password, melakukan backup dan restore database, memperbaiki permasalahan operasional, dll.

g. **MODUL LAPORAN**

Modul LAPORAN digunakan untuk mencetak out put dari modul Operasional, PNPB, Fungsional, dll.

Petunjuk pengoperasian (*user manual*) dalam menggunakan aplikasi SISKARIN secara detail disampaikan dalam LAMPIRAN I halaman 1 sampai dengan 122.

2.4. Kerangka Pemikiran

Gambar 3. Alur pikir Perumusan Strategi Pelayanan Sertifikasi Impor Produk Hasil Perikanan Berbasis Sistem Elektronik Di Balai KIPM Jakarta II

2.5. ALAT ANALISIS LINGKUNGAN BALAI KIPM JAKARTA II

Analisis lingkungan Balai KIPM Jakarta II merupakan salah satu bentuk dari proses manajemen strategi. Hasil dari analisis ini yang nantinya digunakan untuk merumuskan strategi dan melakukan evaluasi strategi. Matrix yang dipakai dalam analisis lingkungan Balai KIPM Jakarta II antara lain adalah IFE Matrix, EFE Matrix, IE Matrix dan SWOT Matrix.

2.5.1. Matriks Evaluasi Faktor Internal (*IFE Matrix*)

Menurut Umar (1999:172), IFE Matrix dapat dikembangkan dalam lima tahap, yaitu :

1. Buatlah daftar *key success factors* seperti yang diidentifikasi pada *internal audit process* sekitar antara sepuluh sampai dua puluh faktor internal, termasuk faktor kekuatan dan kelemahannya.
2. Tentukan bobot nilai antara 0,0 (tidak penting) sampai 1,0 (sangat penting) bagi masing-masing faktor. Nilai bobot menunjukkan kepentingan relative dari faktor tersebut untuk menjadi sukses pada Balai KIPM Jakarta II. Faktor yang dipertimbangkan untuk memiliki peran yang paling besar pada prestasi organisasi nilai tertinggi demikian pula sebaliknya. Jumlah seluruh bobot harus 1,0.
3. Beri *rating* (nilai) antara 1 sampai 4 bagi masing-masing faktor untuk menunjukkan apakah faktor tersebut memiliki kelemahan yang besar (*rating* = 1), kelemahan yang kecil (*rating* = 2), kekuatan yang kecil (*rating* = 3), dan kekuatan yang besar (*rating* = 4). Jadi sebenarnya, *rating* mengacu pada perusahaan sedangkan bobot mengacu pada Balai KIPM Jakarta II berada.
4. Kalikan bobot dan *rating* dari masing-masing faktor untuk menentukan skornya.
5. Jumlahkan total skor masing-masing variabel. Nilainya merupakan nilai bagi organisasi tersebut dari sisi IFE Matrix. Nilai rata-rata adalah 2,5. Jika nilainya di awal 2,5 menandakan bahwa secara internal

Balai KIPM Jakarta II lemah, sedangkan nilai di atas 2,5 menunjukkan posisi internal yang kuat.

2.4.2. Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (*EFE Matrix*)

Menurut Umar (1999:165), ada lima tahap dalam mengembangkan *EFE Matrix* :

1. Buatlah *key success factors* seperti yang diidentifikasi dalam *external-audit process* yang mencakup perihal peluang dan ancaman.
2. Tentukan bobot *key success factors* tadi dengan skala mulai dari 0,0 (tidak penting) sampai 1,0 (sangat penting). Total seluruh bobot dari *key success factors* harus sama dengan 1,0
3. Selanjutnya tentang *rating*. Setiap *key success factors* diberi *rating* antara 1 sampai 4, dimana :
 - 4 = respon sangat bagus,
 - 3 = respon di atas rata-rata,
 - 2 = respon rata-rata,
 - 1 = respon di bawah rata-rata.

Rating ini berdasar pada efektivitas strategi Balai KIPM Jakarta II, dengan demikian nilainya berdasarkan pada kondisi Balai KIPM Jakarta II.

4. Kalikan masing-masing nilai bobot dengan *rating*-nya untuk mendapatkan *score* untuk semua *key success factors*.
5. Jumlah semua *score* untuk mendapatkan nilai *total score* Balai KIPM Jakarta II.

Sudah tentu bahwa dalam *EFE Matrix*, kemungkinan nilai terbesar *total score* adalah 4,0 dan terendah adalah 1,0. *Total score* 4,0 mengindikasikan bahwa Balai KIPM Jakarta II merespon peluang yang ada dengan cara yang luar biasa dan menghindari ancaman-ancaman di pasar industrinya. *Total score* sebesar 1,0 menunjukkan strategi-strategi Balai KIPM Jakarta II tidak memanfaatkan peluang-peluang atau tidak menghindari ancaman-ancaman eksternal.

2.4.3. Matriks Internal Eksternal (*IE Matrix*)

IE Matrix terdiri dari dua dimensi yaitu skor total dari *IFE Matrix* pada sumbu X dan skor total dari *EFE Matrix* pada sumbu Y. Ingat kembali bahwa suatu organisasi harus membuat Matriks *IFE* dan Matriks *EFE* dalam kaitannya dengan organisasi. Skor bobot total yang diperoleh memungkinkan susunan Matriks *IE* dalam suatu perusahaan. Pada sumbu x dari Matriks *IE*, skor bobot *IFE* total 1,0 sampai 1,99 menunjukkan posisi internal yang lemah; skor 2,0 sampai 2,99 dianggap sedang; dan skor 3,0 sampai 4,0 adalah kuat. Serupa dengannya, pada sumbu y, skor bobot *EFE* total 1,0 sampai 1,99 dipandang rendah; skor 2,0 sampai 2,99 dianggap sedang; dan skor 3,0 hingga 4,0 adalah tinggi (Umar, 1999:182).

Menurut David (2009:345), Matriks *IE* dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yang mempunyai implikasi strategi yang berbeda-beda. Pertama, ketentuan untuk divisi-divisi yang masuk dalam sel I, II, atau IV dapat digambarkan sebagai **tumbuh dan membangun** (*grow and built*). Strategi yang intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan

pengembangan produk) atau integratif (integrasi ke belakang, integrasi ke depan, dan integrasi horizontal) bisa menjadi yang paling tepat bagi divisi-divisi ini. Kedua, divisi-divisi yang masuk dalam sel III, V, atau VII dapat ditangani dengan baik melalui strategi **menjaga dan mempertahankan** (*hold and maintain*); penetrasi pasar dan pengembangan produk adalah dua strategi yang paling banyak digunakan dalam jenis divisi ini. Ketiga, ketentuan umum untuk divisi yang masuk dalam sel VI, VIII, atau IX adalah **panen atau divestasi** (*harvest or divest*).

2.4.4. Matrix SWOT

Ada delapan tahap dalam membentuk Matriks SWOT (Umar, 1999:188), yakni :

1. Buatlah daftar peluang kunci eksternal perusahaan
2. Buat daftar ancaman kunci eksternal perusahaan
3. Buat daftar kekuatan kunci internal perusahaan
4. Buat daftar kelemahan kunci internal perusahaan
5. Cocokkan kekuatan-kekuatan internal dan peluang-peluang eksternal dan catat hasilnya dalam sel *SO Strategies*
6. Cocokkan kelemahan-kelemahan internal dan peluang-peluang eksternal dan catat hasilnya dalam sel *WO Strategies*
7. Cocokkan kekuaktan-kekuatan internal dan ancaman-ancaman eksternal dan catat hasilnya dalam sel *ST Strategies*
8. Cocokkan kelemahan-kelemahan internal dan ancaman-ancaman eksternal dan catat hasilnya dalam sel *WT Strategies*

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Balai KIPM Jakarta II dalam melakukan Pelayanan Sertifikasi Impor Produk Hasil Perikanan sudah berbasis elektronik. Sistem Pelayanan Sertifikasi yang digunakan oleh BKIPM tersebut adalah SISKARIN (Sistem Karantina Ikan Online). Dengan SISKARIN tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan Sertifikasi Impor yang efektif, efisien, dan transparan kepada *Stake Holder* Perikanan guna mendukung kelancaran dan kecepatan pengeluaran arus barang dalam kegiatan impor. Dalam pengajuan permohonan Sertifikasi Pengguna Jasa dapat melakukan permohonan melalui sistem PPK (Permohonan Pemeriksaan Karantina) secara online berbasis web.

Dari pelaksanaan Sertifikasi Impor produk perikanan masih ada beberapa yang belum sesuai dengan Janji Layanan (*Service Level Arrangement*) Balai KIPM, permasalahan tersebut terjadi kebanyakan disebabkan oleh Faktor Eksternal (Perusahaan) ada pula kegiatan yang disebabkan oleh Faktor Internal. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa penerapan SISKARIN belum optimal bila dibandingkan dengan target tingkat layanan (*Service Level Arrangement*). Dalam rangka meningkatkan pelayanan, maka diperlukan pemetaan masalah secara mendalam dan penyusunan alternatif strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan Sertifikasi Impor Hasil Perikanan di Balai KIPM Jakarta II sesuai Gambar 4. Alur Matrik Analisis berikut ini:

Gambar 4. Alur Matrix Analisis

3.2. Sumber Informasi

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh berbentuk wawancara sedangkan data sekunder yang diperoleh antara lain sejarah Balai KIPM Jakarta II; visi, misi dan tujuan; data karyawan; serta jenis produk dan jasa dari Balai KIPM Jakarta II.

3.3. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian dilaksanakan Balai KIPM Jakarta II, Badan Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan - Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Penelitian dilaksanakan bulan Januari 2017 sampai dengan November 2017.

3.4. PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh berbentuk wawancara sedangkan data sekunder yang diperoleh antara lain sejarah Balai KIPM Jakarta II; visi, misi dan tujuan; data karyawan; serta jenis produk dan jasa dari Balai KIPM Jakarta II.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan berbagai jenis metode pengumpulan data. Metode yang penulis gunakan adalah metode wawancara, dokumentasi, observasi, serta studi pustaka. Data-data yang telah diidentifikasi kemudian diolah untuk dianalisis. Namun, dari sekian banyaknya alat analisa yang ada, tidak semua alat analisa akan digunakan, tetapi tergantung kepada jenis Organisasi dan data yang tersedia. Berikut adalah gambaran garis besar, pengolahan data yang dilakukan sesuai Gambar 5. Kerangka Formulasi Strategis berikut ini:

TAHAP PENGUMPULAN DATA		
Evaluasi Faktor Internal		Evaluasi Faktor Eksternal
TAHAP ANALISIS		
IFE Matriks	EFE Matriks	IF Matriks
TAHAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN		
SWOT Matriks		

Gambar 5. Kerangka Formulasi Strategis

3.5. METODE ANALISIS DATA

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2012:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Format desain penelitian kualitatif yang digunakan adalah desain deskriptif kualitatif. Mengutip Bungin (2007:68), penelitian menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

Studi kasus yang diangkat dari penelitian ini adalah Balai KIPM Jakarta II untuk menerapkan alternatif strategi yang nantinya dapat menjadi bahan acuan dalam menjalankan Pelayanan Sertifikasi Impor Produk Hasil Perikanan. Penelitian ini dilakukan pada Balai KIPM Jakarta II Jalan Enggano Raya No. 16, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Telepon (021) 43910470, Email: karantinaikan.tanjungpriok@gmail.com.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, penulis membagi ruang lingkup penelitian menjadi dua, yaitu lingkungan **Internal Balai KIPM Jakarta II**, yang meliputi Pelayanan Sertifikasi Impor Produk Hasil Perikanan, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi yang digunakan, serta lingkungan **Eksternal Balai KIPM Jakarta II**.

Analisis lingkungan Balai KIPM Jakarta II diperlukan untuk mengetahui kondisi eksternal dan internal Balai KIPM Jakarta II melalui analisis IFE, EFE dan IF. Selanjutnya, posisi Balai KIPM Jakarta II ditentukan dalam diagram IE. Posisi ini akan menentukan garis besar strategi yang tepat untuk diaplikasikan ke Balai KIPM Jakarta II sesuai dengan kondisi saat ini. Analisis IE akan menghasilkan lebih dari satu alternatif strategi. Untuk menentukan strategi alternatif yang paling tepat maka alternatif strategi yang ada dimasukkan dalam matriks SWOT untuk kemudian diolah dan menghasilkan satu strategi yang dianggap paling tepat untuk dapat diterapkan oleh Balai KIPM Jakarta II saat ini.

Kondisi yang sudah dijabarkan dari analisis tersebut dapat dirumuskan menjadi strategi secara mendetail yang diolah melalui analisis SWOT.

4.1. Analisis IFE

Analisis IFE (*External Factor Evaluation-EFE Matrix*) digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal Balai KIPM Jakarta II. Analisis IFE menyimpulkan dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang besar dalam

daerah-daerah fungsional Balai KIPM Jakarta II. Analisis IFE ini menggunakan bobot dan rating dalam menentukan pengaruh masing-masing faktor.

Analisis Matriks IFE Pelayanan Sertifikasi Impor Produk Hasil Perikanan

Internal Factor Evaluation Matrix (IFE) berasal dari hasil pembobotan dan peratingan faktor internal dengan melihat aspek kekuatan dan kelemahan. Nilai rating berasal dari nilai rata-rata pakar yang bernilai 3 dan 4 untuk aspek kekuatan; nilai 1 dan 2 untuk aspek kelemahan. Sedangkan untuk nilai bobot tiap faktor, masing-masing pakar diminta melakukan perbandingan berpasangan antar faktor-faktor internal yang ada untuk menentukan tingkat kepentingan faktor tersebut dalam bentuk persen apabila dibandingkan antara satu dan faktor lainnya.

Tabel 3
Matriks IFE Balai KIPM Jakarta II

No	Faktor Sukses	Bobot	Rating	Nilai
1	KEKUATAN			
	• Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)	0.01	4	0.04
	• Sistem Pelayanan Sertifikasi berbasis TI	0.2	4	0.8
	• Komitmen Manajemen untuk melakukan perbaikan berkesinambungan	0.01	3	0.03
	• PNBSP Sertifikasi yang murah	0.01	3	0.03
	• Sistem Pembayaran E-banking	0.15	3	0.45
	• Kecepatan pelayanan Pemeriksaan Karantina	0.2	4	0.8
	• Sosialisasi Prosedur, alur pelayanan dan persyaratan lainnya sudah berbasis web	0.01	3	0.03
	• Adanya pelatihan untuk menunjang <i>skill</i>	0.13	3	0.39
2	KELEMAHAN			
	• Belum terintegrasinya Penerbit Rekomendasi Izin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP) dengan system Karantina	0.06	1	0.06
	• Sistem Perizinan Kementerian Lembaga belum terintegrasi dengan SISKARIN	0.06	1	0.06
	• Belum adanya <i>Single Risk Management</i> di Pelabuhan Tanjung Priok	0.06	1	0.06
	• Resistensi Internal	0.01	3	0.03
	• Kurangnya jumlah SDM	0.01	3	0.03

	• Gangguan jaringan internet	0.01	3	0.03
	• Punishment hanya untuk pelanggaran kedisiplinan	0.05	4	0.2
	• Lemahnya verifikasi keabsahan dokumen Sertifikat Kesehatan dari Negara Asal	0.01	3	0.03
	• Belum adanya standarisasi pengembangan TI	0.01	2	0.02
TOTAL		1		3.09

Keterangan:

Rating ditentukan sebagai berikut:

Rating	Keterangan
4	kekuatan yang besar
3	kekuatan yang kecil
2	kelemahan yang kecil
1	memiliki kelemahan yang besar

Berdasarkan dari Tabel 3 dapat dilihat faktor-faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan dari sistem Sertifikasi menggunakan SISKARIN. Faktor kekuatan terdiri dari: Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem Pelayanan Sertifikasi berbasis TI, Komitmen Manajemen untuk melakukan perbaikan berkesinambungan, Komitmen Manajemen untuk melakukan perbaikan berkesinambungan, PNPB Sertifikasi yang murah, Sistem Pembayaran E-banking, Kecepatan pelayanan Pemeriksaan Karantina, Sosialisasi Prosedur, alur pelayanan dan persyaratan lainnya sudah berbasis web, Adanya pelatihan untuk menunjang *skill*.

Faktor-faktor kelemahan meliputi Belum terintegrasinya Penerbit Rekomendasi Izin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP) dengan system Karantina, Sistem Perizinan Kementerian Lembaga belum terintegrasi dengan SISKARIN, Belum adanya *Single Risk Management* di Pelabuhan Tanjung Priok, Resistensi Internal, Kurangnya jumlah SDM, Gangguan jaringan internet, Punishment hanya

untuk pelanggaran kedisiplinan, Lemahnya verifikasi keabsahan dokumen Sertifikat Kesehatan dari Negara Asal, Belum adanya standardisasi pengembangan TI.

Dari Tabel 3 di atas terpilih faktor-faktor internal yang paling berpengaruh terhadap penentuan strategi, yaitu faktor kekuatan Sistem Pelayanan Sertifikasi berbasis TI dan Kecepatan pelayanan Pemeriksaan Karantina; dan faktor kelemahan meliputi Belum terintegrasinya Penerbit Rekomendasi Izin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP) dengan system Karantina, Sistem Perizinan Kementerian Lembaga belum terintegrasi dengan SISKARIN, Belum adanya *Single Risk Management* di Pelabuhan Tanjung Priok.

Berdasarkan Tabel 3, matriks IFE menghasilkan skor bobot total **3.09**. Skor bobot total lebih dari 2,5 dalam skala 1-4 (bobot total **3.09**) mengindikasikan posisi internal yang cukup kuat, sudah mempunyai strategi yang baik dalam mengantisipasi kelemahan eksternal yang ada (David, 2009)

Dalam pemberian ranking dan nilai faktor, penulis berusaha memberikan data seobyektif mungkin. Tetapi pemberian ranking dan nilai faktor tersebut masih mengandung kelemahan karena hanya menggunakan *judgment* sehingga mengandung subjektifitas.

Berdasarkan table 3, matriks IFE Balai KIPM Jakarta II menghasilkan nilai total skor 3,09. Hal ini menunjukkan bahwa Balai KIPM Jakarta II berada di atas rata-rata dari keseluruhan posisi strategisnya dalam usaha memanfaatkan kekuatannya dan menyembunyikan kelemahannya jika perlu.

4. 2. Analisis EFE Pelayanan Sertifikasi Impor Produk Hasil Perikanan

Analisis EFE (*External Factor Evaluation-EFE Matrix*) digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal Balai KIPM Jakarta II supaya dapat dilihat peluang dan ancaman yang ada saat ini. Analisis EFE ini menggunakan bobot dan rating dalam menentukan pengaruh masing-masing faktor.

External Factor Evaluation Matrix (EFE) berasal dari hasil pembobotan dan peratingan faktor eksternal dengan melihat aspek peluang dan ancaman. Nilai rating berasal dari nilai rata-rata pakar yang bernilai 1 hingga 4. Sedangkan untuk nilai bobot tiap faktor, masing-masing pakar diminta melakukan perbandingan berpasangan antar faktor-faktor internal yang ada untuk menentukan tingkat kepentingan faktor tersebut dalam bentuk persen, apabila dibandingkan antara satu dan faktor lainnya.

Tabel 4 dapat dilihat analisis eksternal yang terdiri dari faktor peluang dan faktor ancaman yang paling berpengaruh terhadap penentuan strategi. Faktor peluang yang dapat didata adalah pengajuan dokumen Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK) impor sudah berbasis website, sehingga pengajuan kegiatan importasi dapat dilakukan di mana saja sepanjang bisa terkoneksi dengan internet, tahapan proses Sertifikasi dapat di monitor, proses *custom and clearance* di bea dan cukai dapat dilakukan lebih cepat, dan peluang untuk menurunkan biaya importasi. Faktor-faktor ancaman terdiri dari kurangnya koordinasi antar Kementerian Lembaga (K/L) sebagai pihak yang menerbitkan Rekomendasi/Izin Impor, Belum Terintegrasi SISKARIN dengan Instansi Penerbit Rekomendasi/Izin

Impor, Pengguna Jasa masih banyak yang Gagap Teknologi dalam Pengajuan Izin Impor melalui Sistem PPK Online.

Matrik EFE matrix diperoleh total skor 3,62 mengindikasikan posisi bahwa posisi sistem lebih dari cukup kuat dalam mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal, dalam upaya pemanfaatan peluang, serta mengantisipasi ancaman dan masih cukup ruang bagi perbaikan dalam operasi.

Tabel 4
Matriks EFE Balai KIPM Jakarta II

NO	FAKTOR SUKSES	BOBOT	RATING	NILAI
I	PELUANG			
	1. Kemudahan dan Kecepatan Pengguna Jasa dalam mengajukan proses sertifikasi karena berbasis Elektronik	0.2	4	0.8
	2. Laboratorium dan Sistem Pelayanan Berorientasi Internasional (Tersertifikasi ISO 17025 dan ISO 9001)	0.1	2	0.2
	3. Permintaan Impor Produk Perikanan masih tinggi yang diakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan masyarakat	0.1	4	0.4
	4. SISKARIN Sudah terintegrasi dengan Indonesia Nasional Single Window (INSW)	0.2	3	0.6
	5. Biaya Sertifikasi Murah (PNBP)	0.1	3	0.3

II ANCAMAN

1. Ketidak tertiban pengguna jasa dalam mengajukan Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK).	0.2	1	0.2
2. Sistem Perizinan Kementerian Lembaga belum terintegrasi dengan SISKARIN	0.04	1	0.04
3. Koordinasi dengan K/L masih kurang	0.03	1	0.03
4. Lamanya proses uji konfirmasi ke laboratorium Lain terhadap Media Pembawa yang dinyatakan positif formalin.	0.01	2	0.02
5. Permasalahan Banjir dan Kemacetan yang berpengaruh terhadap lamanya waktu proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.	0.01	3	0.03
6. Biaya Penumpukan yang tinggi (Demurrage)	0.01	3	0.03
TOTAL	1		2.65

Keterangan:

Rating ditentukan sebagai berikut:

Rating	Keterangan
4	Respon sangat bagus
3	Respon diatas rata-rata
2	Respon rata-rata
1	Respon di bawah rata-rata

Dalam pemberian rangking dan nilai faktor, penulis berusaha memberikan data seobyektif mungkin. Tetapi pemberian rangking dan nilai faktor tersebut masib mengandung kelemahan karena hanya menggunakan *judgment* sehingga mengandung subjektifitas.

Berdasarkan tabel 4 di atas, matriks EFE Balai KIPM Jakarta II menghasilkan nilai 2,65. Hal ini menunjukkan bahwa Balai KIPM Jakarta II berada di atas rata-rata dari keseluruhan posisi strategisnya dalam usaha untuk memanfaatkan peluang-peluang eksternal dan menghindari ancaman-ancaman yang mungkin timbul. Namun demikian, masih ada ruang cukup luas untuk peningkatan.

4.3 Analisis IE Pelayanan Sertifikasi Impor Produk Hasil Perikanan

Matriks IE (*internal external*) merupakan matriks portofolio yang memposisikan Balai KIPM Jakarta II dalam tampilan sembilan sel. Posisi suatu Balai KIPM Jakarta II dalam matriks IE ditentukan dari matriks EFE dan matriks IFE. Hasil skor total dari IFE Matrix berada pada sumbu X dan skor total dari EFE Matrix berada pada sumbu Y. Matriks IE menggabungkan skor dari matriks IFE dan EFE untuk mendapatkan posisi sel Pelayanan Sertifikasi Impor Produk Hasil Perikanan di Balai KIPM Jakarta II (David, 2009).

Penggabungan matriks IFE 3,09 dan EFE 2,65 menempatkan posisi di sel IV. Menurut David (2009), organisasi yang termasuk dalam sel I, II dan IV cocok untuk melakukan strategi tumbuh dan membangun (*grow and build*). Strategi yang dapat ditempuh oleh Balai KIPM Jakarta II antara lain **strategi intensif** (*market penetration, market development, and product development*) atau **strategi integratif** (*backward integration, forward integration, and horizontal integration*).

Dalam hal ini, **strategi yang lebih tepat diterapkan di Balai KIPM Jakarta II saat ini adalah strategi intensif yang meliputi strategi**

pengembangan produk (*Product Development Strategy*) Sistem Pelayanan Sertifikikasi Impor. Dalam upaya peningkatan pelayanan Sertifikasi strategi berupaya meningkatkan pelayanan Sertifikasi impor dengan memperbaiki atau memodifikasi sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang ada ataupun mengembangkan yang baru. Dalam pengembangan produk biasanya memerlukan biaya yang besar untuk penelitian dan pengembangan sesuai Gambar 6.

SKOR BOBOT TOTAL IFE

		Kuat 3,00-4,00 3	Sedang 2,00-2,99 2	Lemah 1,00-1,99 1
SKOR BOBOT TOTAL EFE	Tinggi 3,00-4,00 3	I	II	III
	Sedang 2,00-2,99 2	IV	V	VI
	Rendah 1,00-1,99 1	VII	VIII	IX

Gambar 6. Matriks IE Balai KIPM Jakarta II

Menurut matriks IE, maka posisi Balai KIPM Jakarta II berada dalam kuadran IV. Posisi ini mengindikasikan Balai KIPM Jakarta II dalam posisi tumbuh dan membangun (*grow and built*). Strategi yang bisa diterapkan antara lain strategi yang intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk) atau integratif (integrasi ke belakang, integrasi ke depan, dan integrasi horizontal) bisa menjadi pilihan yang paling tepat. Namun strategi yang paling tepat untuk kondisi Balai KIPM Jakarta II saat ini adalah strategi intensif yang meliputi penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Strategi

integratif kurang tepat untuk diaplikasikan karena strategi ini memungkinkan sebuah usaha untuk memperoleh kendali atas distributor, pemasok, dan/atau pesaing. Saat ini, Balai KIPM Jakarta II belum memiliki kapasitas untuk menjadi pemegang kendali bagi distributor, pemasok, dan/atau pesaing. Karena itu, alternatif strategi yang tepat untuk Balai KIPM Jakarta II adalah pasar (*market penetration*), pengembangan pasar (*market development*), dan pengembangan produk (*product development*).

4.4. Matriks SWOT Pelayanan Sertifikasi Impor Produk Hasil Perikanan

Matriks SWOT merupakan alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis Balai KIPM Jakarta II. Matriks ini akan menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi Balai KIPM Jakarta II dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Nantinya matriks ini digunakan untuk membantu pengembangan empat jenis strategi yaitu **Strategi SO** (kekuatan-peluang), **Strategi WO** (kelemahan-peluang), **Strategi ST** (kekuatan- ancaman), **Strategi WT** (kelemahan-ancaman).

Gambar 7. Diagram Analisis SWOT

Analisis SWOT memberikan gambaran strategi secara mendetail dari Balai KIPM Jakarta II. Dengan adanya analisis menggunakan matriks SWOT, Balai KIPM Jakarta II dapat melihat rincian strategi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kinerja Balai KIPM Jakarta II sesuai matriks SWOT seperti pada Tabel 3 berikut:

Tabel 5
Matriks SWOT Balai KIPM Jakarta II

	<u>PELUANG (O)</u>	<u>ANCAMAN (T)</u>
Eksternal	<p>S1. Kemudahan dan Kecepatan Pengguna Jasa dalam mengajukan proses sertifikasi karena berbasis Elektronik</p> <p>S2. Permintaan Impor Produk Perikanan masih tinggi yang diakibatkan tidak terakupinya kebutuhan masyarakat</p> <p>S3. SISKARIN Sudah terintegrasi dengan Indonesia Nasional Single Window (INSW)</p> <p>S4. Biaya Sertifikasi Murah (PNBP)</p>	<p>W1. Semakin bertambahnya jumlah importir, jenis Sertifikasi impor serta kementerian teknis yang terlibat dalam perijinan impor</p> <p>W2. Kurangnya koordinasi dengan kementerian terkait</p> <p>W3. Tingkat kepatuhan pengguna jasa dalam melaporkan dan penyerahan SPPB masih rendah.</p> <p>W4. Kesulitan Input Permohonan Permohonan Pemeriksaan Karantina dikarenakan Pengurus importasi berubah-ubah</p> <p>W5. Masuknya Hama Penyakit Karantina dapat menghancurkan plasma nutfah yang ada di wilayah RI</p>
Internal		

		W6. Importasi ilegal
<p><u>KEKUATAN (S)</u></p> <p>O1. Sistem Sertifikasi Impor terintegrasi dengan INSW</p> <p>O2. Pengajuan permohonan Importasi secara Online</p> <p>O3. Pelayanan sertifikasi cepat, tepat dan transparent</p> <p>O4. Sistem Pembayaran E-banking</p> <p>O5. Biaya Pengujian lebih murah</p> <p>O6. Laboratorium dan Sistem Pelayanan Berorientasi Internasional (Tersertifikasi ISO 17025 dan ISO 9001)</p>	<p><u>STRATEGI (SO)</u></p> <p>1. Integrasi Pengurusan Rekomendasi di Ditjen PSDPKP, Ditjen Budidaya dan BPOM.</p> <p>2. Melakukan simplifikasi prosedur Sertifikasi Impor</p>	<p><u>STRATEGI (ST)</u></p> <p>1. Pengurusan permohonan importasi di kementerian/Lembaga menjadi pengajuan tunggal (<i>Single Submission</i>).</p> <p>2. Peningkatan Pembinaan kepada pengguna jasa</p>
<p><u>KELEMAHAN (W)</u></p> <p>T1. Belum terintegrasinya Penerbit Rekomendasi Izin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP) dengan system Karantina</p> <p>T2. Belum terintegrasinya system perizinan dan penerbit rekomendasi antar Kementerian/Lembaga (K/L)</p> <p>T3. Belum adanya Single Risk Management di Pelabuhan Tanjung Priok</p> <p>T4. Kendala Pertukaran Data dengan INSW</p> <p>T5. Resistensi Internal</p>	<p><u>STRATEGI (WO)</u></p> <p>1. Perbaiki Intergrasi system dengan Kementerian/Lembaga (K/L) menggunakan Single Submission (SSM)</p> <p>2. Pembuatan Indonesia Single Risk Management di Pelabuhan Tanjung Priok</p>	<p><u>STRATEGI (WT)</u></p> <p>1. Perbaiki system pelayanan dengan standardisasi Pengembangan Sistem pertukaran data yang terintegrasi.</p> <p>2. Penyatuan standar pemberian izin masuk dan keluarnya barang di pelabuhan dengan 18 Kementerian/ lembaga</p>

Berdasarkan Tabel SWOT, dapat dirumuskan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Perbaikan Integrasi Sistem Antar Kementerian/Lembaga (K/L).

Pengembangan system TI diarahkan kepada simplifikasi pengembangan pengajuan perizinan importasi antar Kementerian/ Lembaga menjadi Sertifikasi Tunggal (*Single Submission*). Dampak terhadap penyatuan

permohonan importasi tunggal adalah percepatan waktu layanan, penurunan biaya perizinan dan simplifikasi prosedur pengajuan dokumen importasi.

A. KEADAAN SAAT INI

Gambar 8. Prosedur Pengajuan Impor Antar K/L Pada Saat Ini

Penjelasan Alur

1. Importir harus memasukan permohonan ke masing-masing K/L.
Untuk yang memerlukan lebih dari 1 ijin, importir harus mengisi form permohonan di aplikasi masing-masing K/L.
2. Proses permohonan di proses di masing-masing K/L;
3. Respon ijin yang terbit diteruskan ke Portal INSW secara elektronik;

4. Importir mendapatkan feedback informasi terbitnya ijin K/L
5. Mengajukan PIB pada aplikasi PIB Bea Cukai
6. Konsolidasi data PIB dan Ijin K/L pada Portal INSW
7. Terbit SPPB

B. KONSEP SINGLE SUBMISSION BKIPM DENGAN K/L

Gambar 9. Konsep *Single Submission* BKIPM Dengan K/L

Penjelasan:

- Integrasi antara form permohonan perijinan Karantina Ikan, Karantina Pertanian, BPOM dan Bea Cukai dan K/L lainnya ke dalam 1 *form Single Submission*.
- Metode menyampaikan permohonan perijinan impor/ekspor melalui form

permohonan tunggal melalui Portal INSW yang di integrasikan melalui inhouse SISKARIN serta Kementerian dan Lembaga lainnya. Dalam rangka meningkatkan Kualitas layanan sertifikasi.

Manfaat :

1. Single Registration : Pendaftaran melalui portal INSW
2. Single Data : Data disubmit dari INSW
3. Single Document : Dokumen pelengkap di-Upload dari INSW
4. Single Response : Status proses dokumen dilihat dari INSW

Keuntungan:

5. Prosedur Pengajuan Importasi oleh Importir hanya dilakukan sekali melauai portal *Single Submission* (SSM) INSW, tidak lagi dilakukan melalui masing-masing Kementerian dan Lembaga.
6. Seluruh dokumen yang terkirim ke INSW secara otomasi akan dikirimkan ke In house SISKARIN serta Kementerian dan Lembaga lainnya.

2. Perbaikan Sistem TI dengan mengintergrasikan system penerbitan Rekomendasi Impor dengan system karantina.

Penyatuan system TI antara penerbit Izin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal PDSPKP, Surat Keterangan Teknis (SKT) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dengan Sistem Karantina Ikan Online ini perlu segera dilakukan untuk memudahkan bagi Petugas Karantina dalam melakukan verifikasi keabsahan dokumen dan

perhitungan realisasi impor.

3. **Belum adanya *Single Risk Management* di Pelabuhan Tanjung Priok**

Dengan penyatuan standard penilaian terhadap system penjaluran di Pelabuhan Tanjung Priok kedalam *Single Risk Management* tersebut maka akan mendukung serta memperlancar bongkat muat arus barang di pelabuhan, dapat memberikan kepastian usaha, efisiensi waktu, biaya perizinan dan menurunkan *dwelling time*.

Konsep *Single Risk Management* BKIPM dengan Kementerian dan Lembaga Lainnya

- Menggunakan *2 layer risk profiling*
 - a. Layer 1 : *stakeholder risk profiling*
 - b. Layer 2 : *comodity risk profiling + country status*
- *Output* dari *risk profiling* → menentukan bentuk perlakuan (*treatment*)
 - a. Pemeriksaan Dokumen
 - b. Pemeriksaan Fisik
 - c. Pemeriksaan Lab (sampling, uji lab)

A. *Layer I: Stakeholder Risk Profiling*

Harus ditentukan parameter untuk menilai *stakeholder risk profiling*.

- a. Menggunakan profil dari BC;
- b. Ditambahkan parameter KIPM, seperti :
 - Tingkat Kepatuhan terhadap regulasi KKP;

- Kasus pelanggaran;
- History transaksi dan hasil pengujian;
- Surveillance

B. Layer 2: Comodity Risk Profiling

- Parameter ditentukan sesuai aspek kesehatan dan jaminan mutu;
- Eksisting : kategorisasi resiko MP berdasarkan aspek karantina ikan
- Status risk dari komoditi berkorelasi dengan status negara asal komoditi (yang ditetapkan oleh OIE atau notifikasi dari negara asal, dan sebab lain sesuai ketentuan yang berlaku).

4. Perbaiki sistem monitoring dan evaluasi.

Perbaikan monitoring program, kegiatan dan aktifitas pelayanan dilakukan sistem monitoring secara periodik. Evaluasi dari sisi sistem, SDM dan landasan hukum.

5. Perbaiki sistem layanan yang lebih user friendly;

Perbaikan sistem layanan melalui SISKARIN agar lebih sederhana, informatif dan memudahkan pengguna jasa layanan (user friendly).

6. Perbaiki sistem standarisasi data/dokumen;

Perbaikan sistem sesuai dengan bahasa pemrograman serta format yang standar secara internasional (ekspor/impor) yang memungkinkan terjadinya pertukaran data lintas kementerian/instansi/negara.

5. Perbaiki sistem sosialisasi kebijakan

Perbaikan sistem sosialisasi, workshop atau bimbingan teknis terkait perkembangan kebijakan impor dan sistem SISKARIN secara rutin kepada pelaku usaha.

Seperti yang tercantum di paket kebijakan ekonomi XI, penerapan ISRM dilakukan melalui identitas tunggal dan penyatuan informasi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor-impor. Dengan demikian, penerapan ISRM di seluruh kementerian dan lembaga, para pelaku usaha nantinya akan memiliki single identity untuk menjalani proses bisnis.

Single risk management adalah upaya menyatukan database Balai KIPM Jakarta II importir di antara 14 kementerian/lembaga yang menangani berbagai perizinan soal impor seperti DJBC, Kementerian Perdagangan, Badan POM, karantina dan lainnya.

Sebagai salah satu instansi yang memiliki kewenangan di pelabuhan, Bea Cukai ingin supaya disatukan *risk management*-nya.

Pasalnya, selama ini masing-masing kementerian/lembaga menerapkan sendiri-sendiri *risk management* sehingga kadang saling berbenturan. Misalnya, pihak satu sudah setuju, namun pihak lainnya belum sehingga memperlambat proses impor.

BAB V.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan hasil Matrik SWOT didapatkan bahwa kinerja pelayanan Sertifikasi belum memuaskan, namun demikian masih ada beberapa yang perlu dikembangkan terutama: 1). Perbaikan Integrasi Sistem Antar Kementerian/Lembaga (K/L). 2). Perbaikan Sistem TI dengan mengintegrasikan system penerbitan Rekomendasi Impor dengan system karantina. 3). Belum adanya *Single Risk Management* di Pelabuhan Tanjung Priok. 4). Perbaikan sistem monitoring dan evaluasi. 5). Perbaikan sistem layanan yang lebih *user friendly*, 6). Perbaikan sistem standardisasi data/dokumen; 7). Perbaikan sistem sosialisasi kebijakan

Hasil Rumusan Strategi akan disampaikan Penulis sebagai masukan berupa konsep desain dan alur integrasi bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan stakeholder terkait, sebagai sumbangsih pemikiran dalam pengembangan Sistem Pelayanan Karantina yang lebih baik dan modern.

Daftar Pustaka

Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 29/KEP-BKIPM/2015, *Tentang Prosedur Dan Janji Layanan Tindakan Karantina Ikan Dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Di Zona Karantina Pelabuhan Laut*

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana.

Daft, Richard L. 2008. *Management: Manajemen*. Jilid 1. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat. David, Fred R. 2009. *Strategic Management: Manajemen Strategis Konsep*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.

Hariadi, Bambang. 2005. *Strategi Manajemen, Strategi Memenangkan Perang Bisnis*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Jakarta: Bayumedia Publishing.

Jauch, Lawrence R. dan Glueck, William F. 1996. *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.

Kotler, Philip. 2000. *Manajemen Pemasaran*. Jilid 2. Jakarta: Bumi Aksara

Kusuma, Afrieta. (2011). Analisis SWOT untuk Menetapkan Formulasi dan Implementasi Strategi Perusahaan (Studi Kasus di PT. Bank Jatim Cabang Malang). *Skripsi*. Malang: Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Brawijaya

Lamb, Charles W., Hair, Joseph F., dan McDaniel, Carl. 2001. *Pemasaran*. Buku I. Jakarta: Salemba Empat.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cetakan Ketigapuluh. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Nugroho, Susatyo. (1999). Analisis SWOT untuk Idenifikasi Faktor-Faktor Strategik Perusahaan dalam Proses Perumusan Strategi Manufaktur PT. Nayati Indonesia.

Oetomo, Hening Widi & Ardini, Lilis. (2012). SWOT Analysis in Strategic Management : A Case Study at Purabaya Bus Station. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 15(2), 171-186.

Paramarta, Wayan Arya. (2009). Analisis SWOT PT. Astra International, Tbk. *Forum Manajemen*, 7(1), 39-44. j

Pearce, John A. dan Robinson, Richard B. 1997. *Manajemen Strategik: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*. Jilid 1. Jakarta: Binarupa Aksara.

Pearce, John A. dan Robinson, Richard B. 2008. *Manajemen Strategis*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

Tjiptono, Fandy. 2004. *Strategi Pemasaran*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Penerbit Umar, Husein. 1999. *Riset Strategi Perusahaan*. Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama.

**Wang, Kuang-cheng. (2009). A Process View of SWOT Analysis.
*Disertasi.***

Taipei: Institute of Business Administration National Taipei University.

Wheelen, Thomas L. dan Hunger, J. David. 1996. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Wheelen, Thomas L. dan Hunger, J. David. 2003. *Manajemen Strategis*.